

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik Kabupaten Bintan. 2014. *Tabelan dalam Angka*. BPS Bintan
- Cahyono, fery dwi. 2020. *Potret Kemandirian Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan*. Yogyakarta : Bintang Pustaka Madani.
- Djirimu, Ahlis. 2020. *Program-Program Pemberdayaan Masyarakat di Provinsi Sulawesi Tengah Membangun Paradigma Berbasis Modal dan Paradigma Berbasis Nilai*. Yogyakarta : Deepublish.
- Handini, Sri. 2019. *Strategi Pemberdayaan Masyarakat dalam Upaya Pengembangan UMKM Wilayah Pesisir*. Surabaya : Scopindo Media Pustaka.
- Irwan, Djamal Zoer'aini. 2009. *Besarnya Eksploitasi Perempuan dan Lingkungan di Indonesia*. Jakarta : PT Elex Media Komputindo.
- Irmayani, Nyi R. 2019. *Kinerja Pendamping Program Keluarga Harapan Pasca Diklat Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga*. Jakarta : Puslitbangkesos Kementerian Sosial RI.
- M Pd, Syafaruddin. 2012. *Pendidikan dan Pemberdayaan Masyarakat*. Medan : Perdana Publishing.
- Maryani, Dedeh. 2019. *Pemberdayaan masyarakat*. Yogyakarta : Deepublish.
- Primanto, Aji. 2020. *Otonomi Daerah dan Pemberdayaan Masyarakat di Indonesia*. Malang : Intelegensia Media.
- Setiawan, Harjanto Hari. 2020. *Kewirausahaan Sosial Penerima Program Keluarga harapan (PKH) gradiasi*. Jakarta : Puslibang Kementerian Sosial RI.
- Utaminingsih, alifiulahtin. 2020. *Feminisasi Kemiskinan Pemberdayaan Perempuan Berperspektif Sosiopsikologis*. Malang : UB Press

Sumber Internet :

<https://repository.mentrouniv.ac.id/id/eprint/2467/DESI%20PRATIWI%201502040021%20SKRIPSI%20LENGKAP.pdf> diakses kamis, 15 Oktober 2020, 09.00

Wib

<https://repository.iainpurwokerto.ac.id/6650/2/EFEKTIVITAS%20PROGRAM%20KELUARGA%20HARAPAN%20%28PKH%29%20DALAM%20UPAYA%20MENIN.pdf> diakses Kamis 15 Oktober 2020, 09.02 Wib

<http://repositori.uin>

alauddin.ac.id/13001/1/Implementasi%20program%20keluarga%20harapan%20%28PKH%29%20di%20kecamatan%20mambi%20kabupaten%20mamasa.pdf diakses Jum'at 16 Oktober 2020, 10.00 Wib

<http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/49312/1/RAUDHOTUL%20JANNAH.FISIP.pdf> diakses Jum'at 16 Oktober 2020, 10.05 Wib

http://digilip.uin-suka.ac.id/27739/2/13250100_BAB_I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf diakses Sabtu 17 Oktober 2020, 01.00 Wib

<http://digilip.uin->

suka.ac.id/35657/1/15720007_LINDA%20ISTIYAWATI_BAB%20I_BAB%20IV_DAFTAR%20PUSTAKA.pdf diakses Sabtu 17 Oktober 2020, 01.05 Wib

Sumber Lain :

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Ketentuan Umum Pasal 1 ayat 12 bahwa pemberdayaan masyarakat desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.

Undang-undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia.

Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jamsostanasional.

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin

Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyangang Disabilitas.

Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Non Tunai
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 156).

Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.

Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8).

Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2015 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 86).

Peraturan Menteri Sosial Nomor 10 Tahun 2016 tentang Mekanisme Penggunaan Data Terpatu Program Penanganan Fakir Miskin (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 705).

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 187).

Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 254/PMK.05/2015 tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/Lembaga.

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

Inpres Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi poin lampiran ke 46 tentang Pelaksanaan Transparansi Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Bersyarat Bagi Keluarga Sangat Miskin (KSM) Sebagai Peserta PKH (PKH).